KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR didesak bentuk TGPF
Tanggal : Rabu, 15 Mei 2019
Surat Kabar : Republika
Halaman : 3

DPR Didesak Bentuk TGPF

INDRIANTO EKO SUWARSO/ANTARA

KASUS KPPS MENINGGAL Menteri Kesehatan Nila F Moeloek memberikan penjelasan saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5). RDP mendengarkan penjelasan Menkes terkait hasil audit medis petugas KPPS yang meninggal serta mengenai antisipasi penyakit cacar monyet.

● ARIF SATRIO NUGROHO

DPR upayakan bentuk panja atau pansus pemilu.

JAKARTA – Sekelompok masyarakat yang tergabung ke dalam Aliansi Masyarakat Peduli Tragedi Kemanusiaan Pemilu 2019 menemui Ketua DPR Bambang Soesatyo, Selasa (14/5). Aliansi Masyarakat ini mendesak DPR dan pemerintah untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) agar mengungkap penyebab meninggalnya ratusan petugas Pemilu 2019.

Pemrakarsa Aliansi Masyarakat Peduli Tragedi Kemanusiaan Pemilu 2019 terdiri atas tokoh agama, pimpinan organisasi, akademisi, advokat, dokter, hingga aktivis sosial. Di antaranya ada nama mantan ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, mantan komisioner KPU Chusnul Mariyah, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Busyro Muqoddas, aktivis Iwan Piliang, psikolog forensik Reza Indragiri Amriel, akademisi Nyoman Udayana Sangging, hingga pakar hukum pidana Teuku Nasrullah.

Dewan Pengarah Aliansi Masyarakat Peduli Tragedi Kemanusiaan Pemilu 2019 Din Syamsyuddin menuturkan, harus ada klarifikasi dan penjelasan terkait penyebab meninggalnya petugas KPPS, petugas pengawas, dan petugas pengamanan Pemilu 2019. Menurut Din, kalau klarifikasi ini tidak ada, dikhawatirkan menjadi preseden buruk dan dosa bawaan pada siapa pun pihak yang terpilih dalam Pemilu 2019 nanti. Jadi, harus ada tim gabungan khusus yang melakukan investigasi terkait kasus tersebut. "Tidak ada cara lain, itu dilakukanlah semua supaya jernih sehingga tidak lagi menyesatkan atau muncul dugaan-dugaan," ujar Din di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/5).

Selain membentuk TGPF Pemilu 2019, Din menyarankan agar ada autopsi terhadap korban penyelenggaraan pemilu serentak 2019 ini. Selain itu, menurut dia, kalau mau mengungkap penyebab kematian, harus ada autopsi dan tidak ada cara lain yang bisa dilakukan agar permasalahan jernih sehingga tidak lagi menyesatkan atau memunculkan dugaan-dugaan. Menurut dia, apa pun hasil dari penyelidikan, pihaknya tidak mau menduga-duga sehingga untuk menepis dugaan yang negatif, harus ada pembuktian.

Menurut dia, peristiwa tersebut merupakan peristiwa luar biasa dan

termasuk ke dalam tragedi kemanusiaan. Ia menganggap, jika ada pembiaran, hal itu berbahaya bagi bangsa. "Justru kalau ada pembiaran dan tidak sungguh-sungguh memberikan jawaban, misalnya, mengatakan ini takdir Ilahi, tumbal demokrasi, ini berbahaya bagi bangsa Indonesia," katanya.

Desakan pembentukan TGPF mendapat sambutan baik dari Wakil Ketua DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan Fadli Zon. Menurut dia, TGPF dinilai perlu untuk mengungkap secara perinci fenomena meninggalnya ratusan petugas pemilu. "Perlu ada semacam tim pencari fakta atau tim gabungan pencari fakta karena ini *kan* nyawa manusia yang sangat serius. Satu orang saja harus diinvestigasi, apalagi sampai 600-an," ujarnya.

Fadli menegaskan, akan mendorong pembentukan TGPF dari internal DPR. Politikus Gerindra ini mengatakan, TGPF juga akan diupayakan dari dalam DPR melalui panitia kerja atau panitia khusus. Fadli mengkritik pemerintah yang dinilai terlalu lambat dan belum tuntas mengungkap penyebab meninggalnya ratusan petugas pemilu. Sementara, Ketua DPR Bambang Soesatyo mengklaim telah meminta Komisi II DPR untuk melakukan rapat gabungan antara KPU, Bawaslu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan kepolisian untuk mencari penyebab meninggalnya petugas pemilu. Namun, pertemuan tersebut baru akan digelar setelah 22 Mei. Politikus Partai Golkar ini berdalih, DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu telah coba mengantisipasi jatuhnya banyak korban pada Pemilu 2019.

Bambang mengatakan, kasus meninggalnya ratusan petugas pemilu dapat dijadikan evaluasi untuk penyempurnaan penyelenggaraan pemilu berikutnya. Selain itu, ia mengimbau KPU memperketat seleksi petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), terutama dari sisi kesehatan. "Rata-rata berdasarkan temuan dokter Indonesia, mereka memiliki penyakit kronis kurang lebih 13 penyakit. Di samping juga ada kecelakaan lalu lintas," ungkapnya.

Sebelumnya, KPU mempersilakan jika ada pihak yang ingin membentuk tim investigasi meninggalnya petugas Pemilu 2019. Komisioner KPU Ilham Saputra hanya mengimbau, semua pihak menghormati kerja dan usaha dari KPPS demi suksesnya pemilu. Menurut dia, tidak etis jika dilakukan investigasi, apalagi autopsi terhadap KPPS yang meninggal. ■ **ed:** agus raharjo

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Menkes: Autopsi Forensik Bukan Wewenang Kami

● ARIF SATRIO NUGROHO

JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan hanya berwenang melakukan autopsi verbal untuk mengungkap dugaan penyebab meninggalnya ratusan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Menteri Kesehatan Nila Djuwita Moeloek menegaskan, pihaknya tidak memiliki wewenang untuk melakukan autopsi forensik mencari penyebab ratusan petugas pemilu wafat.

"Kami, yang bisa kami lakukan adalah autopsi verbal," kata Nila Moeloek di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (14/5). Ia menjelaskan, autopsi verbal adalah metode untuk mengetahui penyebab kematian melalui wawancara dengan anggota keluarga mengenai tanda-tanda dan gejala-gejala yang muncul sebelum seseorang meninggal.

Menurut Nila, Kemenkes tidak melakukan autopsi verbal pada semua korban. Namun, autopsi verbal dilakukan secara acak oleh tim independen yang dibentuk Kemenkes. Nila menerangkan, wewenang autopsi forensik berada di kepolisian. Autopsi forensik hanya bisa dilakukan bila sudah muncul kecurigaan dan ketidakwajaran dalam kematian para anggota KPPS.

"Autopsi forensik itu adalah kalau kita sudah curiga kematiannya tidak wajar, kemudian tentu ada juga pengajuan dari keluarga, dan tentu itu ranahnya polisi, itu bukan juga dari kami," kata dia. Autopsi forensik ini menjadi bagian dari investigasi Kemenkes dalam mengungkap penyebab meninggalnya ratusan anggota KPPS yang meninggal. Nila mengatakan, penyelidikan memang sewajarnya harus dibicarakan. Namun, ia belum bisa mematok target berapa lama investigasi bisa selesai. "Kita serahkan, kita *kan* independen. Kita tidak bisa kasih jadwal," ujarnya.

Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes Tri Hesty Widyastoeti mengatakan, Kemenkes sudah mulai mendata dan memeriksa petugas pemilu yang wafat sejak Senin lalu. Meski demikian, ia belum bisa memastikan penyebab meninggalnya per pasien secara perinci. Sebab, datanya perlu pendalaman dan investigasi. Salah satu upaya yang ditempuh Kemenkes adalah autopsi verbal bagi yang wafat di luar rumah sakit. Sementara, audit kematian dilakukan bagi yang wafat di rumah sakit. "Laporannya baru dari 17 provinsi. Nanti akan di-*update* terus," ujarnya.

Kemenkes belum memiliki target pasti kapan pendataan dan investigasi bakal tuntas. Sebab, petugas kesehatan terkendala luasnya wilayahnya. Bahkan, kasus kematian petugas pemilu juga terjadi hingga pelosok Indonesia. "Ada yang tempat-tempat sulit kabupatennya. Terpencil. Banyak belum masuk (laporannya)," kata dia.

Wakil Ketua DPR Koordinator Politik dan Keamanan Fadli Zon meminta Kemenkes membuka data investigasi penyebab meninggalnya ratusan petugas KPPS. Pembukaan data dinilai perlu untuk meluruskan spekulasi yang beredar di masyarakat. Menurut Fadli, baiknya penyebab meninggalnya ratusan petugas diusut kasus per kasus. "Kalau misalnya Kemenkes bisa membeberkan dua pertiga saja dari 600 orang yang meninggal ini ya, saya kira itu akan bisa masuk akal," kata politikus Gerindra ini.

ed: agus raharjo

PERPUSTAKAAN DPR-RI